

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi termasuk kejahatan *Extraordinary Crime* yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*Extraordinary*). Kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum sehingga dapat mempersulit proses peradilan. Ketidakhadiran terdakwa dipersidangan dapat menghambat proses penanganan perkara. Berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam peradilan *in absentia* dan apakah putusan hakim No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan tujuan UU Tindak Pidana Korupsi dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yakni putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yakni buku literatur dan bahan hukum tersier yakni seperti kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan pada pembuktian telah sesuai menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan *in absentia*) dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara. Peradilan *in absentia* merupakan pengecualian yang diatur oleh KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Pasal 145 KUHAP berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah melalui pembuktian yang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang dilaksanakan secara *in absentia* telah menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* dengan mengacu ketentuan Pasal 38 UU Tipikordan asas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 Kitab Hukum Acara pidana (KUHAP) meskipun peradilan *in absentia* pengecualian yang diatur dalam ketentuan umum yaitu KUHAP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah telah mencerminkan spirit dari peradilan *in absentia* dan sesuai tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya adalah menyelamatkan kekayaan negara.

Kata Kunci :Tindak Pidana Korupsi,Peradilan *in absentia*, Pengembalian Aset

ABSTRACT

*Criminal Acts of Corruption, including an extraordinary crimes which occur systematically and extensively, so that their eradication must be carried out in an extraordinary way. Obstacles in eradicating corruption, one of it is the large number of perpetrators of corruption who escaped from the snares of the law so that it can make difficult the process of criminal justice. The absence of the defendant at trial can interfere the case handling process. In connection with the absence of the defendant the purpose of this study is to know from the formula of the problem such as how is the evidence at trial in absentia and whether the decision of the judge No.54 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Sby is in accordance with the objectives with the Law of Criminal Acts of Corruption in order to save the country's wealth. The data used in this research is using secondary data with primary law materials is a decision No.54 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Sby and related laws and regulations, secondary law materials, namely literature books and tertiary law materials such as law dictionary. The result of this study showed that the evidence was suitable according to Section 38 of Law Number 20 Year 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 Concerning the Eradication of Corruption Crime (TPK Law) regulates the opportunity for examination in a trial of corruption cases without the presence of the defendant (judiciary in absentia) with the intention of saving country's wealth. Court in absentia is an exception regulated by the Criminal Procedure Code, but in its implementation it must be based on the Section 145 Criminal Procedure Code regarding to the procedures for legal summons. The defendant was proven to have violated Section 2 of Law Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption after going through evidence which was carried out in the absence of the defendant (in absentia). The judge in proving the mistake of the defendant which was carried out in absentia had applied the *lex specialis derogate legi generali* principle by referring to the provisions of Section 38 of the Anti-Corruption Law and the minimum principle of proof in accordance with Section 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP) even though the in absentia court was the exception regulated in the general provisions, namely the KUHP. The verdict handed down by the judge whether it has reflect the spirit of the judiciary in absentia and in accordance with the objectives of the Criminal Acts of Corruption, one of it is to save the country's wealth.*

Keywords : Criminal Acts of Corruption, judiciary in absentia, Return of Assets